
**PENGARUH PROSEDUR REVIU TERHADAP KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

*THE EFFECT OF REVIEW PROCEDURES ON THE QUALITY OF REVIEWS OF LOCAL GOVERNMENT
FINANCIAL STATEMENTS IN NORTHERN MINAHASA REGENCY*

Oleh :

Agustina Fice Bekaiang¹

Jullie J. Sondakh²

Meily Yoke Betsy Kalalo³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail :

¹bekaiang.vice@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³bestymeilykalalo@gmail.com

ABSTRAK : Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikurangi dengan adanya reviu. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik. Hasil reviu yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria tepat waktu (*timelines*), lengkap (*disclosure*) dan informatif. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan kualitas pelaksanaan reviu harus memenuhi kriteria : waktu pelaksanaan, kompetensi pereviu, tahapan reviu, kertas kerja reviu, pelaporan reviu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prosedur reviu terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,530 > 1,68$) dan (Sig.) $0,000 < 0,05$ artinya bahwa prosedur reviu berpengaruh signifikan terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Prosedur Reviu, Kualitas Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

ABSTRACT : *Errors in the presentation of local government financial statements can be reduced by review. Review is a procedure of tracking numbers in financial statements, inquiries, and analytics. Quality review results must meet timely, complete, and informative criteria. According to Regulation of the Minister of Finance No. 8/PMK.09/2015 on Standard Review of Local Government Financial Statements, the quality of the implementation of the review must meet the following criteria : time of execution, competence of person conducting review, stages of review, working paper review, reporting review. The purpose of this study is to determine the effect of review procedures on the quality of reviews of local government financial statements in Northern Minahasa Regency. The result of research shows $t_{count} > t_{table}$ ($4,530 > 1,68$) and (Sig.) $0,000 < 0,05$ means that the review procedure has a significant effect on the quality of review of local government financial statements.*

Keywords : *Review procedures, quality reviews, local government financial statements*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban secara terus-menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena pemerintahan selalu digambarkan sebagai birokrat yang panjang dan memiliki tingkat praktik korupsi yang parah Sugmadilaga *et. al* (2015). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dalam hal pengelolaan keuangan dimana semua entitas pelaporan harus menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik, serta memberikan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi akuntansi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal Mahsun *et. al* (2011 : 115). Penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikurangi dengan adanya reviu. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 menjelaskan reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik. Reviu LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bedanya dengan audit reviu tidak memberikan opini dan tidak menguji kebenaran substansi dokumen sumber Simpen (2015).

Berdasarkan karakteristik laporan keuangan diatas, maka hasil reviu LKPD yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria tepat waktu (*timelines*), lengkap (*disclosure*), dan informatif sehingga tujuan reviu dapat tercapai Widyarini (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kualitas pelaksanaan reviu harus memenuhi kriteria waktu pelaksanaan reviu, kompetensi pereviu, tahapan reviu, kertas kerja reviu, pelaporan reviu. Kondisi ini cukup beralasan agar hasil reviu dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun sesuai dengan SAP.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh prosedur reviu terhadap kualitas reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Prosedur**

Pengertian prosedur menurut Nafarin (2007 : 9), prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai, entitas, ekonomi terutama mengenai keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan Beestet *al*(2009). Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fungsi laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Reviu Laporan Keuangan

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada klasifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah proses reviu (Bauwhede, 2001).

Kualitas Reviu Laporan Keuangan

Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kuat dapat membantu mencapai laporan keuangan yang lebih berkualitas (Susilawati & Riana, 2014). Laporan keuangan akan berguna apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dipahami. Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka hasil reviu LKPD yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria tepat waktu (*timelines*), lengkap (*Disclosure*), dan informatif.

Komponen Kualitas Reviu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : waktu pelaksanaan, tahapan reviu, kompetensi pereviu, kertas kerja reviu, pelaporan reviu.

Penelitian Terdahulu

1. Komang Widyarini (2016) melakukan penelitian berjudul : Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu berpengaruh terhadap kualitas reviu LKPD sedangkan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas reviu LKPD. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas prosedur reviu, perbedaan terletak pada isi dalam pembahasan dan objek penelitian.
2. Kema Ihwan (2013) melakukan penelitian berjudul : Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. Hasil penelitian pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 belum mengacu pada SAP, tetapi secara keseluruhan pemerintah Kota Manado telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. persamaan dengan penelitian ini metode kuantitatif, Perbedaan terletak pada variabel bebas dan terikat serta objek penelitian.
3. Made Wahyu Saputra (2013) melakukan penelitian berjudul : *Review*Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil penelitian format laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, perbedaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif dan objek penelitian.
4. Iqlima A. Manaf (2014) melakukan penelitian berjudul : Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan hanya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Proses Reviu yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Pemahaman Sistem Pengendalian Intern tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Persamaan variabel bebas reviu, perbedaan isi dan objek penelitian.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh prosedur reviu terhadap kualitas reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik Sugiyono (2012 : 23).

Tempat dan Waktu

Peneliti melakukan penelitian pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara – Sarongsong II Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara. waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 01 Maret – 31 Maret 2017.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang populasinya mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2016 : 117). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 39 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 40 orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel, teknik ini disebut sampel jenuh atau sensus Sugiyono (2016 : 118).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk kuesioner yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	No Pernyataan	Skala Pengukuran
Prosedur Reviu (X)	1. Penelusuran Angka-angka	1-3	Likert
	2. Permintaan Keterangan	4-6	
	3. Analitik	7-9	
Kualitas Reviu (Y)	1. Waktu Pelaksanaan reviu	10-12	Likert
	2. Kompetensi Pereviu	13-15	
	3. Tahapan Reviu	16-18	
	4. Kertas Kerja Reviu	19-21	
	5. Pelaporan Reviu	22-24	

Sumber: Data Olahan Kuesioner

Metode Analisis**1. Uji Instrumen**

- Uji Validitas

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidaknya item-item pernyataan dalam kuesioner. Jika suatu item memiliki nilai capaian korelasi minimal 0,30 dianggap memiliki daya pembeda yang cukup memuaskan atau dianggap valid Wibowo (2012 : 36).

- Uji Reabilitas
Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk.

2. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
- Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).
- Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

$$Y = a + Bx$$

4. Uji Parsial (Uji t)

Menguji hipotesis yang diajukan, maka digunakan statistik uji t. Uji t adalah untuk menguji variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri.

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya prosedur rewiu tidak berpengaruh terhadap kualitas rewiu laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_a: \beta_1 \neq 0$, artinya prosedur rewiu berpengaruh terhadap kualitas rewiu laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengujiannya adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima, jika sebaliknya maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian kriteria yang lain yaitu apabila signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan apabila signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

5. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Analisis korelasi (R) ini digunakan untuk mengetahui besaran yang dapat menyatakan seberapa kuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel 5%	Keterangan
P1	0,445	0,316	Valid
P2	0,636	0,316	Valid
P3	0,481	0,316	Valid
P4	0,501	0,316	Valid
P5	0,578	0,316	Valid
P6	0,657	0,316	Valid
P7	0,404	0,316	Valid
P8	0,580	0,316	Valid
P9	0,487	0,316	Valid

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel 5%	Keterangan
P1	0,399	0,316	Valid
P2	0,469	0,316	Valid
P3	0,341	0,316	Valid
P4	0,484	0,316	Valid
P5	0,585	0,316	Valid
P6	0,401	0,316	Valid
P7	0,585	0,316	Valid
P8	0,433	0,316	Valid
P9	0,523	0,316	Valid
P10	0,417	0,316	Valid
P11	0,448	0,316	Valid
P12	0,443	0,316	Valid
P13	0,572	0,316	Valid
P14	0,770	0,316	Valid
P15	0,516	0,316	Valid

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 2 dan 3 hasil uji validitas untuk variabel X (Prosedur Reviu) dan variabel Y (Kualitas Reviu) dengan jumlah total 24 pernyataan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sudah valid atau sah, alasannya karena $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} .

Uji Reabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
X dan Y	0,859	0,60	39	Reliable

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4 hasil uji reabilitas di atas, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan *Cronbanh's Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel dapat dinyatakan handal atau reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
		Prosedur Reviu	Kualitas Reviu
N		39	39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	37.9231	64.5641
	Std. Deviation	3.65905	4.99365
Most Extreme Differences	Absolute	.099	.113
	Positive	.096	.085
	Negative	-.099	-.113
Test Statistic		.099	.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 5 untuk uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-smirnov* variabel X (Prosedur Reviu) dan variabel Y (Kualitas Reviu) berdistribusi normal, dengan dasar pengambilan keputusannya : Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data normal, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak normal, maka dapat dilihat nilai signifikan dari variabel X dan Y $> 0,05$ yaitu 0,200.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.597 ^a	.357	.339	4.05895	1.490

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

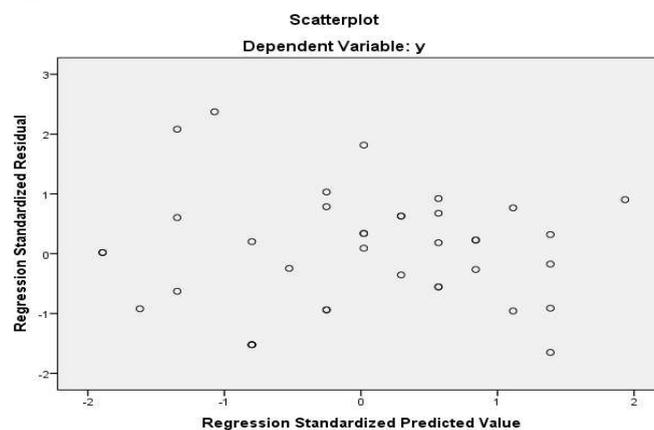
Tabel 7. Durbin Watson

D = DW	DL	Du	4-dl	4-du
1,490	1,4347	1,5396	2,5653	2,4604

Sumber : Lihat Tabel DW, $\alpha=5\%$

Dari tabel 6 dan 7 nilai $D=DW$ (1,490), DL (1,4347), DU (1,5396). Dari nilai-nilai yang ditunjukkan dapat diambil keputusan melalui dasar pengambilan keputusan yaitu jika $d < dl < du$ maka keputusannya adalah tidak ada kesimpulan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat pada gambar 1 uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot (*scatterplot*). Disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada tabel diatas karena penyebaran titik tidak berpola, dan tidak berkumpul hanya diatas dan dibawah tetapi menyebar kesemua titik.

Analisis Regresi Linier Sederhana**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji t(Coefficients^a)**

Model		Unstandardized		Standardize	T	Sig.
		Coefficients		d		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.653	6.855		4.909	.000
	Prosedur Reviu	.815	.180	.597	4.530	.000

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Pada tabel 8 untuk hasil uji analisis regresi sederhana seperti yang disajikan diatas persamaan yang didapati adalah $Y = 33,653 + 0,185X$. Menunjukkan konstanta = 33,653 dengan artian bahwa jika tidak ada variabel X (Prosedur Reviu), maka Variabel Y (Kualitas Reviu) akan tetap konstan bernilai 33,653.

Uji t terletak pada tabel 8 untuk kolom t didapati nilai $t_{hitung} 4,530 > t_{tabel} 1,68$. Kemudian nilai probabilitas signifikansi $0,000 > 0,05$. Dari hasil perbandingan ini, dapat diambil keputusan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti prosedur reviu berpengaruh signifikan terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Utara.

Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi(Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.357	.339	4.05895

Sumber : Data Olahan Menggunakan SPSS 22.0

Hasil analisis koefisien korelasi (R) menghasilkan nilai 0,597 atau 59,7% yang berarti terjadi hubungan yang cukup kuat antara variabel X (Prosedur Reviu) dan Variabel Y (Kualitas Reviu). Hasil uji determinasi yang ditunjukkan pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,339 atau 33,9%. Angka tersebut memberikan arti bahwa kualitas reviu dipengaruhi oleh prosedur reviu sebesar 33,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor dan variabel diluar penelitian ini.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Persamaan regresi linier sederhana $Y = 33,653 + 0,815X$ memberikan arti bahwa variabel Y (kualitas reviu) adalah konstan, jika tidak ada variabel X (Prosedur Reviu) maka variabel Y akan tetap konstan bernilai 33,953. Namun karena nilainya positif maka jika variabel Y naik akan diikuti oleh variabel X.
2. Dari uji koefisien korelasi (R) menghasilkan nilai 0,597 atau 59,7% yang artinya variabel X (Prosedur Reviu) dan Variabel Y (Kualitas Reviu) memiliki hubungan yang cukup kuat. Uji determinasi *Adjusted R Square* dengan nilai 0,339 atau 33,9% yang berarti kualitas reviu dipengaruhi prosedur reviu sebesar 33,9%, sisanya dipengaruhi oleh faktor dan variabel diluar penelitian ini.
3. Hasil pengujian hipotesis, menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

Disarankan dan diharapkan kepada seluruh APIP pada Inspektorat yang melakukan reviu, senantiasa terus melakukan perbaikan demi mendapatkan prosedur reviu yang lebih baik lagi, karena dengan prosedur yang baik mampu meningkatkan kualitas reviu itu sendiri. Agar nantinya kesalahan-kesalahan yang ditemui pada saat reviu dapat dikurangi dengan adanya dasar atau prosedur yang baik. Sehingga kedepannya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Beest F.V, Braam, G. & Boelens, S 2009. Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. Universitas Nijmegen. Nice Working Paper. http://www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf
- Kema, I. 2013. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2215>
- Mahsun, Moh., Sulistiyowati F., & Purwanugraha H.A., 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFPE.
- Manaf, A. Iqlima, Arfan M, & Darwanis 2014. Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Aceh <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/search/authors/view?firstName=Iqlima%20A.%20Manaf%2C&middleName=Muhhammad%20Arfan%2C&lastName=Darwanis.&affiliation=&country=ID>
- Nafarin. M 2013. Penganggaran Perusahaan. Cetakan ke-1. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015. Tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Saputra W. Made, Putra A.P. I Made & Sujana Edy, 2013. Review Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewpublisher&pub=47>
- Simpem W.I 2015. Pengaruh Pengalaman Dan Proses Reviu Pada Pertimbangan Auditor Dalam Menilai Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Daerah Di Provinsi Bali). E-Jurnal Universitas Udayana. Bali <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/113f8b81f9711b6e7e02b945f6de632f.pdf>
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- _____, 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., Mulyani, S. 2015. Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. Procedia Social and Behavioral Sciences Universitas Padjajaran. Bandung <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28640/governancebrief09.pdf>
- Susilawati & D.S Riana 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Journal Universitas Syiah Kuala. Aceh. <https://www.coursehero.com/file/10453424/2-Susilawati-Dwi-Seftihani-Riana-STAR-Vol-XI-No-1-2014/>

Wibowo, Agung Edi, 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Penerbit Gaya Media. Batam.

Widyarini, Komang 2016. *Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali. <https://www.neliti.com/publications/44789/pengaruh-prosedur-pendidikan-tekanan-waktu-dan-anggaran-reviu-pada-kualitas-revi>

